

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim, memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan berbagai potensi yang ada baik dalam bidang pariwisata maupun bidang kelautan dan perikanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut seluas 2:3 dari luas teritorialnya, Negara Indonesia memiliki potensi kelautan yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional ditujukan pada pengelolaan sumber daya yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017).

Sebagai negara maritim, sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah nelayan. Secara umum nelayan adalah penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan sumber kehidupan ekonominya bergantung secara langsung pada kegiatan mengolah sumber daya laut. Menurut Dahar (2016), nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti memakai jaring) maupun secara tidak langsung (juru mudi

perahu layar, nahkoda kapal ikan bermotor, ahli mesin kapal, juru masak kapal penangkapan ikan), sebagai mata pencaharian.

Mengingat 2/3 dari wilayah Nusantara adalah laut, seharusnya penduduk Indonesia dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan taraf hidup dan mencapai kesejahteraan. Potensi sumber daya laut tersebut memiliki nilai ekonomi yang besar untuk kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat nelayan. Ironisnya nelayan Indonesia identik dengan masalah kemiskinan. Karena tidak semua nelayan dapat menikmati hidup yang sejahtera dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan menurut Nikijuluw (2002), nelayan termasuk paling miskin di semua negara dengan atribut "*the poorest of poor*" (termiskin diantara yang miskin). Fenomena kesejahteraan nelayan yang rendah merupakan permasalahan yang sering terjadi, namun masalah ini masih belum dapat diselesaikan hingga kini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya hasil tangkapan ikan. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh produksi hasil tangkapan. Banyaknya tangkapan dapat secara langsung berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima.

Menurut Wahyono *et.al* (2001) dan Kusnadi (2007), pendapatan usaha tangkap nelayan sangat berbeda dengan jenis usaha lainnya, seperti pedagang atau petani. Jika pedagang dapat menjumlahkan keuntungan yang diperolehnya setiap bulannya, begitu pula petani dapat memprediksi hasil panennya, maka tidak demikian dengan nelayan yang kegiatannya penuh dengan ketidakpastian

(*uncertainty*) serta bersifat spekulatif dan fluktuatif. Maka tidak heran jika nelayan berada dibawah garis kemiskinan. Pendapatan nelayan bergantung pada kondisi alam. Perubahan musim dapat menyebabkan pendapatan nelayan tidak dapat diprediksi. Dibuktikan dengan pendapatan nelayan meningkat ketika musim ikan dan pendapatan menurun ketika musim sepi ikan sehingga menyebabkan intensitas melaut semakin berkurang. Dengan demikian hal tersebut berpengaruh pada pendapatan nelayan yang berkurang secara drastis. Dampaknya jumlah pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan nelayan baik pada musim ikan maupun sepi ikan. Salah satu contoh permasalahan kemiskinan yang di hadapi oleh nelayan terjadi di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Wilayah Kabupaten Pangandaran berada pada $108^{\circ}30'$ sampai dengan $108^{\circ}40'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}40'20''$ sampai dengan $7^{\circ}50'20''$ Lintang Selatan. Dilihat di peta Jawa Barat, Kabupaten Pangandaran terletak paling tenggara. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah barat dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudera Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan mencapai 101.092 Ha terbagi dalam sepuluh kecamatan diantaranya Cimerak, Cijulang, Parigi, Sidamulih, Pangandaran, Kalipucang, Mangunjaya, Padaherang, Langkaplancar, Cigugur. Wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan garis pantai samudera Indonesia yang membentang di 6 kecamatan dengan panjang garis pantai mencapai 91 km, yang berpotensi terhadap subsektor perikanan (Kabupaten Pangandaran Dalam Angka, 2018).

Potensi perikanan laut Kabupaten Pangandaran terdapat di 7 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu TPI Madasari, TPI Legok Jawa dan TPI Muaragatah di Kecamatan Cimerak, kemudian TPI Batu Karas dan TPI Nusawiru di Kecamatan Cijulang, TPI Parigi di Kecamatan Parigi dan TPI Minasari di Kecamatan Pangandaran (Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, 2018).

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran dan merupakan sektor andalan dibandingkan dengan sektor dan subsektor lainnya. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran terlihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Berlaku Tahun 2015-2018

Tahun	Kontribusi terhadap PDRB (Ribu Rupiah)	Persentase (%)
2015	2.280.088,30	27,91
2016	2.534.595,06	27,11
2017	2.780.044,57	26,57
2018	2.855.044,57	25,3

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran 2019 (Data Diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 kontribusinya sebesar Rp 2.280.088,30 ribu meningkat menjadi Rp 2.855.044,57 ribu di tahun 2018. Namun, berbeda dengan

kontribusi yang terus meningkat, produksi perikanan khususnya di bidang perikanan tangkap laut Kabupaten Pangandaran cenderung berfluktuasi pada 4 tahun terakhir. Berikut adalah Tabel 1.2 jumlah produksi perikanan tangkap laut Kabupaten Pangandaran:

Tabel 1.2
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Produksi (ton)
2015	2.846,068
2016	1.049,492
2017	2.832,152
2018	2.339,462

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran 2019 (Data Diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tangkap laut Kabupaten Pangandaran mengalami fluktuasi pada 4 tahun terakhir. Yang menyita perhatian pada tahun 2016 terjadi penurunan produksi perikanan laut secara drastis yaitu hingga 2 kali lipat dari produksi tahun 2015. Penurunan produksi perikanan tahun 2016 disebabkan karena curah hujan Kabupaten Pangandaran sangat tinggi, sehingga pakan alami untuk ikan di laut sangat sedikit yang menyebabkan ikan tidak bisa berproduksi dengan banyak. Pakan alami untuk ikan disebut fitoplankton, yaitu tumbuhan laut yang mampu melakukan fotosintesis dan merupakan pensuplai utama oksigen terlarut di perairan. Curah hujan yang tinggi juga menyebabkan intensitas melaut nelayan berkurang karena terjadi badai. Kasus ini juga terjadi di Kecamatan Pangandaran dimana terjadi penurunan tajam hasil produksi perikanan tangkap. Hasil produksi perikanan tangkap laut Kecamatan Pangandaran terlihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Laut Kecamatan Pangandaran Tahun 2015-2018

Tahun	Jumlah Produksi (ton)
2015	1.447,556
2016	549,513
2017	1.618,864
2018	1.165,003

Sumber: Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran 2019 (Data Diolah)

Produksi atau hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan. Apabila produksi meningkat, pendapatan juga meningkat, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, hal yang diharapkan adalah peningkatan jumlah produksi, akan tetapi berdasarkan data pada Tabel 1.3 di atas, jumlah produksi hasil tangkapan di Kecamatan Pangandaran justru mengalami penurunan di tahun 2016. Sama halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, penurunan ini disebabkan oleh curah hujan tinggi yang menyebabkan pakan alami ikan sangat sedikit untuk ikan berproduksi dan intensitas melaut nelayan berkurang karena terjadi badai. Penurunan jumlah produksi yang sangat drastis terjadi di Kecamatan Pangandaran pada tahun 2016 tersebut juga mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan sehingga masyarakat nelayan Kecamatan Pangandaran yang berada dalam belunggu kemiskinan, akan semakin miskin.

Dalam melakukan penangkapan ikan, nelayan Kecamatan Pangandaran menggunakan perahu bermotor. Rata-rata ukuran perahu bermotor nelayan Kecamatan Pangandaran yaitu 1-2 *Gross Tonnage* (GT). Dalam pengoperasian

perahu, nelayan membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Penggunaan BBM merupakan salah satu modal kerja yang harus ditanggung oleh nelayan agar dapat melaut. Penggunaan BBM juga dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana jarak yang ditempuh dan seberapa lama waktu yang dihabiskan oleh nelayan dalam melaut.

Nelayan merupakan pekerjaan yang berat, namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka yang bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang diwariskan dari orang tua. Bukan yang dipelajari secara profesional. Penguasaan dan keterampilan seorang nelayan dapat dilihat dari pengalaman melautnya. Sehingga semakin tinggi pengalaman seorang nelayan diasumsikan bahwa semakin efisien dan efektif dalam proses penangkapan hasil laut sehingga dapat meningkatkan pendapatan nelayan (Gitosudarmo, 1999).

Dari uraian diatas penulis akan mengamati dan menganalisis pengaruh hasil tangkapan, penggunaan BBM dan pengalaman melaut terhadap pendapatan nelayan yang dituangkan dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh hasil tangkapan, penggunaan BBM dan pengalaman melaut secara parsial terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana pengaruh hasil tangkapan, penggunaan BBM dan pengalaman melaut secara bersama terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?

1.3 Tujuan Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh hasil tangkapan, penggunaan BBM dan pengalaman melaut secara parsial terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh hasil tangkapan, penggunaan BBM dan pengalaman melaut secara bersama terhadap pendapatan nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi penulis

Untuk menambah pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan di Kabupaten Pangandaran.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan dan sumber inspirasi, serta bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran dan instansi terkait dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. Alasan memilih objek Kecamatan Pangandaran karena jumlah populasi nelayan terbanyak dari Kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Pangandaran.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih lima bulan, yaitu dimulai Februari 2019 sampai dengan Juni 2019. Jadwal kegiatan penelitian terlihat pada Tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Februari 2019	Maret 2019	April 2019	Mei 2019	Juni 2019
Persiapan Administrasi					
Survei Awal					
Penyusunan BAB 1, 2 dan 3					
Bimbingan dan Revisi UP					
Seminar Usulan Penelitian					
Pengajuan Kuisisioner					
Pengolahan Data dan Penyusunan Skripsi					
Bimbingan dan Revisi Naskah Skripsi					
Sidang Skripsi					
Sidang Akhir					